

Analisis Kohesi dan Koherensi Wacana di Media Cetak: Refleksi Kepaduan Bentuk dan Makna dalam Wacana Harian Kompas

oleh
Burhanuddin
Universitas Mataram, email: burhanuddin.fkip@unram.ac.id

Abstrak

Selama ini kajian tentang struktur kebahasaan lebih banyak diarahkan pada kajian tentang bunyi, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat sedangkan kajian tentang wacana sangat jarang dilakukan. Tulisan ini mencoba menganalisis wacana yang terdapat dalam *Harian Kompas* (tanggal 15 Juni 2017) yang berkaitan dengan kepaduan bentuk dan makna sekaligus mengidentifikasi fungsi, kategori, dan makna unsur langsung pembentuk kalimat dalam wacana. Secara metodologis, data dikumpulkan menggunakan metode observasi atau simak dan dianalisis menggunakan metode pada intralingual. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, pada aspek kohesi, wacana *Harian Kompas* cenderung menggunakan (1) penanda hubungan leksikal yang ditandai dengan pengulangan, (2) perangkaian melalui penggunaan kata-kata transisi seperti *dengan, namun,* (3) penunjukan dengan menggunakan ke depan secara anaforik, misalnya *tersebut*. Dari aspek koherensi, untuk menjaga kepaduan cenderung menggunakan (1) pertalian 'penjumlahan', (2) pertalian 'perlawanan', serta (3) pertalian 'cara'. Secara sintaksis, kalimat-kalimat pembangun wacana terdiri atas kalimat atasan dan bawahan. Kalimat atasan cenderung mengemban fungsi Predikat dan Subjek sedangkan kalimat bawahan cenderung mengemban fungsi Keterangan.

Kata kunci : *wacana, kohesi, koherensi, fungsi, kategori, makna.*

Abstracts

Former studies on language structure are mainly focused on the study of sound, morpheme, word, clause, and sentence, while, the study on discourse is rarely found. This writing analyzes some discourses published in *Kompas* (15 June 2017). It specifically analyzes the discourses which contain cohesion between form and meaning. It also analyzes the identification of discourse, focused on aspect of function, category, and meaning that perform sentences in discourse. Methodologically, the data were collected using observation or references method and analyzed by using method on intralingual. The results of the data analysis show that, in the aspect of cohesion, the Kompas Daily discourse tends to use (1) lexical relation markers characterized by repetition, (2) sequencing through the use of transitional words such as, however, (3) anaphoric, for example. From the coherence aspect, to maintain cohesiveness tends to use (1) 'sum' conjunction, (2) 'resistance', and (3) 'way' affiliation. Syntactically, discourse-building sentences consist of sentences of superiors and subordinates. Sentence

superiors tend to carry Predicate and Subject functions whereas subordinate sentences tend to carry the function Description.

Key words: *Discourse, cohesion, coherence, function, category, meaning*

PENDAHULUAN

Kajian tentang bahasa Indonesia telah banyak dilakukan dan meliputi seluruh satuan bahasa, yaitu bunyi, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Dari satuan-satuan terse-but, satuan wacanalalah yang belum banyak diteliti. Padahal kesalahan penggunaan bahasa relatif banyak pada tataran itu. Yang menarik adalah kesalahan di bidang wacana berbeda dengan kesalahan-kesalahan pada bidang lain, misalnya ejaan yang lebih kurang bermakna menyimpang dari kaidah tata bahasa yang berlaku, kesalahan di bidang wacana bermakna adanya unsur wacana yang menyebabkan paragraf itu tidak padu, atau yang menyebabkan tidak adanya kepaduan pada paragraf, baik kepaduan dalam bidang *bentuk* maupun di bidang *makna* (Ramlan, 1993).

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mendeskripsikan kohesi dan koherensi wacana sekaligus mengidentifikasi fungsi, kategori, dan makna unsur langsung pembentuk kalimat da-lam wacana. Hal ini dirasakan penting karena terkait dengan alur pikiran dan pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang Ilmu bahasa (linguistik).

Adapun wacana yang menjadi sasaran yang kajian adalah wacana yang terdapat dalam Harian Kompas tanggal 15 Juni 2017 yang berjudul *BI Izinkan SKBDN Valuta Asing*. Pemilihan wacana ini atau harian kompas sebagai sasaran kajian secara teknis tidak ada alas an mendasar. Hanya saja sebagai sebuah harian nasional yang bonafit perlu diketahui bagaimana bentuk kepaduan dan kesatuan yang terdapat dalam wacana yang ditulis dan dibaca oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga berita yang mereka tulis sudah cukup informative atau tidak.

Masalah pokok yang akan dipecahkan dalam kajian ini adalah kohesi, koherensi, dan identifikasi frase yang menjadi unsur langsung pembentuk kalimat. Masalah pokok tersebut dapat diformulasi bagaimanakah jenis kohesi dan koherensi serta fungsi, kategori, dan makna frase-frase yang membangun keutuhan wacana dan pembentuk kalimat khususnya dalam wacana “BI Izinkan SKBDN Valuta Asing“ dalam harian Kompas tanggal 15 Juni 2017?. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, konsep paragraf yang dianut dalam tulisan ini adalah pandangan (Ramlan, 1993 dan 1996), Halliday dan Hasan (1976:4), dan Baryadi (1990:41).

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode observasi atau dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode agih, yaitu metode yang pelaksanaannya dengan menggunakan unsur penentu yang berupa unsur bahasa itu sendiri (Sudaryanto, 1993:31). Metode agih dilaksanakan dngan teknik dasar BUL (bagi unsur langsung) dan teknik lan-jutan, yaitu teknik ganti, teknik lesap, dan teknik markah. Teknik ganti digunakan untuk membuktikan kesamaan kelas suatu konstituen, yaitu unsur pengganti dan unsur terganti pada kohesi suatu konstituen (yaitu unsur pengganti dan unsur terganti pada kohesi peng-gantian) antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Teknik lesap digunakan untuk membuktikan kadar keintian suatu konstituen antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Teknik markah digunakan untuk memahami hubungan makna antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Penyajian hasil analisis data dengan memaparkan kaidah-

kaidah kohesi dan kohe-rensensi wacana yang dianalisis. Kaidah-kaidah tersebut dipaparkan dengan metode informal, yaitu paparan yang menggunakan rumusan kata-kata biasa (Sudaryanto: 144 -157). Sedangkan data penelitian berupa wacana yang diambil dari “BI Izinkan SKBDN Valuta Asing” dalam harian Kompas tanggal 15 Juni 2017 (lihat lampiran 1).

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai kepaduan baik berupa ko-hesi maupun koherensi, serta analisis fungsi, kategori, dan peran kalimat dalam wacana *BI Izinkan SKBDN Valuta Asing*. Wacana ini diambil dari harian *Kompas* tanggal 15 Mei 2017. Penulis hanya mengambil empat paragraf pertama dari sepuluh paragraf yang ada. Berikut kami kutip empat paragraf pertama dimaksud untuk keperluan analisis dalam tulisan ini.

“BI IZINKAN SKBDN VALUTA ASING”

(1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan pe-nerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas).

(2) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. (3) Namun, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

(4) Dengan diizinkannya penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam meman-faatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

(5) Kebijakan baru BI tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/-2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN. (6) Ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang dike-luarkan BI tahun 1996 hingga 1998.

.....

Harian Kompas 15 Juni 2017

Keempat paragraf di atas terdiri dari enam buah kalimat. Keenam kalimat tersebut akan dijadikan bahan analisis dalam tulisan ini.

Kohesi dalam Wacana “BI Izinkan SKBDN Valuta Asing”

Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan beberapa jenis kohesi dalam wacana di atas, yaitu penanda hubungan leksikal, perangkaian, dan penunjukkan.

1. Penanda Hubungan Leksikal

Kepaduan antara kalimat (1) dan kalimat (2) ditandai oleh adanya pemakaian unsur pengulangan pada kalimat (2).

(1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas).

(2) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.

Pada kalimat (1) terdapat frase *Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)* diulang pada kalimat (2) dalam bentuk frase *SKBDN*. Kohesi penanda hubungan

lek-ikal berupa *pengulangan* juga terjadi antara kalimat (3) dengan kalimat (1) dan kalimat (2).

- (1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan penerbitan *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas)*.
- (2) *SKBDN diterbitkan* dalam mata uang rupiah.
- (3) Namun, *SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional*.

Kepaduan antara kalimat (3) dengan kalimat (1) dan kalimat (2) ditandai dengan adanya pengulangan berupa singkatan *SKBDN* pada kalimat (3) diulang dari frase *Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)* pada kalimat (1) dan berupa singkatan *SKBDN* pada kalimat (2). Selain itu, penanda hubungan leksikal yang berupa pengulangan juga terjadi antara ketiga kalimat di atas dengan kalimat (4).

- (1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) *mengizinkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas)*.
- (2) *SKBDN diterbitkan* dalam mata uang rupiah.
- (3) Namun, *SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional*.
- (4) Dengan *diizinkannya penerbitan SKBDN dalam valuta asing* dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

Hubungan antara kalimat (4) dengan kalimat (1), (2), dan (3) ditandai dengan adanya hubungan leksikal berupa pengulangan berupa frase *diizinkannya penerbitan SKBDN dalam valuta asing* pada kalimat (4) yang diulang dari frase *mengizinkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas)* pada kalimat (1), frase *SKBDN diterbitkan* pada kalimat (2), dan frase *SKBDN dapat diterbitkan dalam valas* pada kalimat (3).

2. Perangkaian

Selain kepaduan yang bersifat hubungan leksikal (*lexical cohesion*) berupa pengulangan, juga ditemukan adanya kepaduan yang berupa perangkaian.

- (2) *SKBDN diterbitkan* dalam mata uang rupiah.
- (3) *Namun, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional*.

Pada awal kalimat (3) terdapat kata *namun* yang menandai hubungan antara kedua kalimat itu. Kepaduan antara kalimat (2) dan kalimat (3) selain berupa pengulangan juga ditandai oleh kepaduan yang berupa *perangkaian*. Begitu juga pemakaian penanda hubungan perangkaian kata *dengan* pada kalimat (4), menandai kepaduan antara kalimat itu dengan kalimat (1), (2), dan (3).

- (1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan

- penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas).
- (2) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.
 - (3) Namun, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.
 - (4) Dengan diizinkan penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

Penanda hubungan perangkaian biasanya selalu terletak di awal kalimat yang kedua atau yang kemudian seperti di atas (Ramlan, 1993: 27).

3. Penunjukkan

Kepaduan antara kalima (4) dan kalimat (5) ditandai dengan adanya pemakaian penanda hubungan penunjukkan *tersebut*.

- (4) Dengan *diizinkan penerbitan SKBDN dalam valuta asing* dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.
- (5) Kebijakan baru BI *tersebut* tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN.

Kata *tersebut* pada frase *kebijakan baru BI tersebut* pada kalimat (5) menunjuk ke depan secara anaforik pada frase *diizinkan penerbitan SKBDN dalam valuta asing* yang tercantum pada kalimat (4). Sedangkan kepaduan antara kalimat (5) dan kalimat (6) ditandai oleh adanya pemakaian penanda penunjukan kata *ini* pada kalimat (6).

- (5) Kebijakan baru BI *tersebut* tertuang dalam *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017* tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN.
- (6) *Ini* merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang dikeluarkan BI tahun 1996 hingga 1998.

Kata penunjuk *ini* pada frase *ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya* pada kalimat (6) menunjuk ke depan pada frase *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/ 2017* pada kalimat (5).

Koherensi dalam Wacana “BI Izinkan SKBDN Valuta Asing”

Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan beberapa jenis pertalian makna (kekoherensian) dalam wacana “BI Izinkan SKBDN Valuta Asing”, yaitu pertalian ‘penjumlahan’, pertalian ‘per-lawanan’, dan pertalian ‘cara’.

1. Pertalian ‘penjumlahan’

Hubungan makna penjumlahan biasanya ditandai oleh konjungsi antarkalimat tertentu. Pertalian makna antara kalimat (1) dan kalimat (2) sebagai berikut.

- (1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan

penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas).

(2) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.

Pertalian ‘penjumlahan’ antara kalimat (1) dengan kalimat (2) tidak ditandai oleh konjungsi antarkalimat tertentu. Akan tetapi, diketahui bahwa hubungan makna kedua kalimat itu adalah menyatakan ‘penjumlahan’. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemungkinan hadirnya kata *dan* sebagai penghubung di antara kedua kalimat sehingga menjadi :

(7) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas) *dan* diterbitkan dalam mata uang rupiah.

Demikian juga halnya pertalian makna antara kalimat (4) dengan kalimat (5).

(4) Dengan diizinkan penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

(7) Kebijakan baru BI tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN.

Hubungan antara kalimat (4) dan kalimat (5) tidak ditandai penanda hubungan perangkaian, namun dapat diketahui hubungan itu menyatakan pertalian ‘penjumlahan’ berdasarkan mungkin digunakan penghubung *dan* untuk menghubungkan kedua kalimat itu hingga menjadi :

(8) Dengan diizinkan penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional *dan* kebijakan baru BI tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN.

Begitu juga hubungan antara kalimat (5) dan kalimat (6).

(5) Kebijakan baru BI tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN.

(6) *Ini* merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang dikeluarkan BI tahun 1996 hingga 1998.

Hubungan antara kalimat (5) dan kalimat (6) tidak ditandai penanda hubungan perangkaian, namun dapat diketahui hubungan itu menyatakan pertalian ‘penjumlahan’ berdasarkan mungkin digunakan penghubung *dan* untuk menghubungkan kedua kalimat itu hingga menjadi :

(9) Kebijakan baru BI tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN *dan* ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang dikeluarkan BI tahun 1996 hingga 1998.

2. Pertalian ‘perlawanan’

Kalau kekoherensian pada kalimat (1) dan kalimat (2), kalimat (4) dan kalimat (5), dan kalimat (5) dan kalimat (6) ditandai dengan pertalian ‘penjumlahan’, kepaduan antara kalimat (2) dan kalimat (3) adalah pertalian ‘perlawanan’.

(2) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.

(3) *Namun*, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

Pada kalimat (2) dinyatakan bahwa SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. Pada kalimat (3) dinyatakan bahwa penerbitan SKBDN juga diterbitkan dalam valas. Dua hal yang bertentangan yang dinyatakan dalam kalimat (2) dan kalimat (3) itu dihubungkan dengan penanda hubungan *namun*. Jadi, kata *namun* pada kalimat (3) menandai hubungan makna *perlawanan* dengan kalimat (2).

3. Pertalian ‘cara’

Selain dua jenis pertalian di atas, kepaduan dalam wacana “BI Izinkan SKBDN Valuta Asing”, juga ditemukan pertalian ‘cara’, yaitu antara kalimat (3) dan kalimat (4).

(3) *Namun*, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

(4) *Dengan* diizinkan penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

Pada kalimat (3) dinyatakan bahwa SKBDN dapat juga diterbitkan dalam valas sepanjang terkait dengan transaksi perdagangan internasional, dan kalimat (4) dinyatakan bahwa penerbitan SKBDN tersebut diharapkan memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian nasional. Perbuatan yang tersebut pada kalimat (4) itu dapat dilakukan dengan cara yang disebutkan pada kalimat (3). Demikianlah terdapat pertalian cara yang dalam kalimat (4) itu ditandai dengan penanda hubungan dengan. Selain itu, dimungkinkan-kannya kata *dengan* digantikan dengan kata *dengan demikian*, sehingga menjadi :

(10) *Namun*, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional *dengan demikian* diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

Analisis Fungsi, Kategori, dan Makna Frase-Frase Unsur Langsung Pembentuk Kalimat

Pada bagian ini akan dianalisis keenam kalimat di atas tentang fungsi, kategori, dan makna frase-frase sebagai unsur pembentuk kalimat.

(1) Untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional, Bank Indonesia (BI) mengizinkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas).

Kalimat (1) terdiri dari dua klausa, yaitu klausa *memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan perdagangan internasional* sebagai klausa bawahan dan klausa *Bank Indonesia (BI) mengizinkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam valuta asing (valas)* sebagai klausa inti. Kata *untuk* dalam kalimat (1) pada klausa bawahan berfungsi sebagai penghubung klausa dalam hubungannya dengan klausa inti, klausa bawahan itu sendiri menduduki fungsi KET. Makna yang timbul sebagai akibat pertemuan antara klausa bawahan dengan klausa inti yaitu menyatakan makna ‘harapan’. Secara jelas hubungan makna ditandai dengan kata penghubung *untuk*.

Unsur langsung pembentuk kalimat (1) pada klausa bawahan terdiri dari unsur *memperlancar* menduduki fungsi P, berkategori verba, menyatakan makna ‘perbuatan’; unsur *transaksi perdagangan dalam negeri* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna ‘hasil’; unsur *yang terkait dengan perdagangan internasional* menduduki fungsi PEL, berkategori V, menyatakan makna ‘alat’. Frase *transaksi perdagangan internasional dalam negeri* unsur langsungnya terdiri dari unsur *transaksi perdagangan* dan unsur *dalam negeri*. Frase *yang terkait dengan perdagangan internasional* terdiri dari unsur *yang terkait* dan unsur *dengan perdagangan internasional*. Adapun klausa inti terdiri dari unsur *Bank Indonesia (BI)* menduduki fungsi S, berkategori N, menyatakan makna ‘pelaku’; unsur *mengizinkan* menduduki fungsi P, berkategori verba, menyatakan makna ‘perbuatan’; unsur *penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna ‘hasil’; dan unsur *dalam valuta asing (valas)* menduduki fungsi PEL, berkategori N, menyatakan makna ‘alat’. Frase *penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)* unsur langsungnya terdiri dari unsur *penerbitan* dan unsur *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)*. Frase *dalam valuta asing (valas)* unsur langsungnya terdiri dari unsur *dalam* termasuk golongan kata Depan dan unsur *valuta asing (valas)* termasuk golongan N.

(2) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.

Dari penelitian terhadap unsur-unsurnya, kalimat (2) hanya terdiri dari satu klausa. Unsur-unsur pembentuknya yaitu unsur *SKBDN* menduduki fungsi S, berkategori N, menyatakan makna hasil; unsur *diterbitkan* menduduki fungsi P, berkategori verba, menyatakan makna perbuatan; unsur *dalam mata uang rupiah* menduduki fungsi KET, berkategori N, menyatakan makna ‘alat’. Frase *dalam mata uang rupiah* terdiri dari unsur *dalam* berkategori kata depan dan unsur *mata uang rupiah* berkategori N. Frase *mata uang rupiah* terdiri dari unsur *mata uang* berkategori N dan unsur *rupiah* berkategori N.

(3) Namun, SKBDN dapat diterbitkan dalam valas sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

Kalimat (3) terdiri dari dua klausa, yaitu klausa *SKBDN dapat diterbitkan dalam valas* sebagai klausa inti dan klausa *SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional* sebagai klausa bawahan. Sedangkan kata *sepanjang* (dapat juga berarti *selama*) pada kalimat (3) berfungsi sebagai penghubung kedua klausa tersebut. Klausa bawahan dalam hubungannya dengan klausa inti menduduki fungsi KET. Makna yang timbul sebagai akibat pertemuan antara klausa bawahan dengan klausa inti yaitu menyatakan makna ‘syarat’.

Unsur langsung klausa inti kalimat (3) terdiri dari unsur *SKBDN* menduduki fungsi S, berkategori nomina, menyatakan makna alat; unsur *dapat diterbitkan* menduduki fungsi P, berkategori verba, menyatakan makna pemerolehan; dan unsur *dalam valas* menduduki fungsi PEL, berkategori N, menyatakan makna hasil. Frase *dapat diterbitkan* merupakan frase endosentrik dengan UP *diterbitkan* dan Atr. *dalam*. Klausa bawahan unsur langsung

pembentuknya terdiri dari *SKBD* menduduki fungsi S, berkategori N, menyatakan makna alat; unsur *terkait* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna keadaan; dan unsur *dengan transaksi perdagangan internasional* menduduki fungsi KET, berkategori FD, menyatakan makna alat. Frase *dengan transaksi perdagangan internasional* unsur langsungnya terdiri dari unsur *dengan* berkategori kata depan, dan unsur *transaksi perdagangan internasional* berkategori N. Frase *transaksi perdagangan internasional* unsur langsungnya terdiri dari unsur *transaksi* berkategori dapat V/N dan unsur *perdagangan internasional* berkategori N.

- (4) Dengan diizinkannya penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

Kalimat (4) terdiri dari dua klausa yaitu klausa *diizinkannya penerbitan SKBDN dalam valuta asing dalam PBI ini* sebagai klausa bawahan, klausa *diharapkan dapat memberikan sti-mulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada akhirnya mampu lebih menggerakkan kembali roda perekonomian nasional* sebagai klausa inti. Kata *dengan* menghubungkan antara klausa inti dan klausa bawahan, klausa bawahan sendiri menduduki fungsi ket. Makna yang timbul sebagai akibat pertemuan klausa bawahan dan klausa inti yaitu menyatakan makna *syarat*. Klausa inti terdiri dari tiga klausa yaitu klausa (1) *diha-rapkan*, klausa (2) *dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan mem-peroleh potensi perekonomian*, dan klausa (3) *mampu lebih menggerakkan kembali roda pere-konomian nasional*. Kata *yang pada akhirnya* berfungsi menghubungkan klausa (2) dan klausa (3) yang menyatakan makna *perturutan*.

Klausa bawahan pada kalimat (4) unsur langsungnya terdiri dari unsur *diizinkannya* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna perbuatan; unsur *penerbitan SKBDN* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna hasil; unsur *dalam valuta asing* menduduki fungsi KET1, berkategori N., menyatakan makna hasil; dan unsur *dalam PBI ini* menduduki fungsi KET2, berkategori ket., menyatakan makna alat .

Klausa (1) pada klausa inti yaitu unsur *diharapkan* (terjadi pelepasan S), menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna keadaan. Klausa (2) *dapat memberikan stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian* unsur langsungnya terdiri dari unsur *dapat memberikan* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna perbuatan, termasuk frase endosentrik dengan UP *memberikan* dan Atr *dapat* (kata tambah); unsur *stimulus* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna penerima; unsur *bagi sektor riil* menduduki fungsi KET1, berkategori ket., menyatakan makna tempat; unsur *dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian* menduduki fungsi KET2, berkategori ket., menyatakan makna cara. Frase *bagi sektor riil* unsur langsungnya terdiri dari unsur *bagi* berkategori kata depan, menyatakan makna tempat dan unsur *sektor riil* berkategori N. Frase *dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian* terdiri dari unsur *dalam* dan unsur *memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian* berkategori V, menyatakan makna perbuatan, unsur langsung frase ini terdiri dari unsur *memanfaatkan dan memperoleh* berkategori V, menyatakan makna perbuatan dan unsur *potensi perekonomian* berkategori N. Klausa (3) *mampu lebih menggerakkan kembali perekonomian nasional* unsur langsungnya terdiri dari unsur *mampu lebih menggerakkan kembali* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna perbuatan dan unsur *roda perekonomian nasional* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna penerima. Kata *mampu* dalam frase *mampu lebih menggerakkan* menurut hemat penulis sejajar dengan frasa *dapat lebih menggerakkan*. Jadi kata *mampu* dalam frase tersebut dapat disejajarkan

dengan makna kata *dapat*. Frase *mampu lebih menggerakkan* terdiri dari unsur *mampu lebih* berkategori KT dan unsur *menggerakkan* berkategori V, menyatakan makna perbuatan. Frase *roda perekonomian nasional* unsur langsungnya terdiri dari unsur *roda perekonomian* dan unsur *nasional*.

- (5) Kebijakan baru BI tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/6/PBI/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang SKBDN.

Kalimat (5) hanya terdiri dari satu klausa yang unsur langsungnya terdiri dari unsur *kebijakan baru BI tersebut* menduduki fungsi S, berkategori N, menyatakan makna hasil; unsur *tertuang* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna keadaan; unsur *dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2017* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna alat; unsur *tanggal 2 Mei 2017* menduduki fungsi KET1, berkategori ket., menyatakan makna waktu; dan unsur *tentang SKBDN* menduduki fungsi KET2, berkategori N, menyatakan makna alat. Frase *kebijakan baru BI tersebut* unsur langsungnya terdiri dari unsur *kebijakan baru BI* dan unsur *tersebut*, sedangkan unsur *kebijakan baru BI* unsur langsungnya *kebijakan baru* dan unsur *BI*. Frase *dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2017* terdiri dari unsur *dalam* dan unsur *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2017* berkategori N, menyatakan makna alat. Frase *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2017* terdiri dari unsur *Peraturan Bank Indonesia (PBI)* dan unsur *No. 5/6/PBI/2017*.

- (6) Ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang dikeluarkan BI tahun 1996 hingga 1998.

Kalimat (6) terdiri dari dua klausa, yaitu klausa *ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya* sebagai klausa inti dan klausa *dikeluarkan BI tahun 1996 hingga 1998* sebagai klausa bawahan. Kata *yang* dalam kalimat (6) pada klausa bawahan berfungsi sebagai penghubung klausa dalam hubungannya dengan klausa inti. Makna yang timbul sebagai akibat pertemuan antara klausa bawahan dengan klausa inti yaitu menyatakan makna penerang. Klausa inti unsur langsungnya terdiri dari unsur *ini* (mengganti frase *Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2017*) menduduki fungsi S, berkategori N, menyatakan makna hasil; unsur *merupakan* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna pengenalan; unsur *penyempurnaan* menduduki fungsi PEL, berkategori N, menyatakan makna alat; dan unsur *dari ketentuan sebelumnya* menduduki fungsi KET, berkategori FD, menyatakan makna waktu. Sedangkan klausa bawahan unsur langsungnya terdiri dari unsur *dikeluarkan* menduduki fungsi P, berkategori V, menyatakan makna perbuatan; unsur *BI* menduduki fungsi O, berkategori N, menyatakan makna pelaku; unsur *tahun 1996 hingga 1998* menduduki fungsi KET, berkategori ket., menyatakan makna waktu.

SIMPULAN

Keutuhan sebuah wacana dapat dibentuk oleh beberapa aspek. Aspek-aspek itu adalah kohesi dan koherensi. Kohesi dapat membentuk keutuhan wacana dalam kaitannya dengan kepaduan bentuk antarkalimat yang membangun wacana itu. Koherensi, dalam perannya sebagai pembentuk keutuhan wacana, berkaitan dengan keterpautan makna kalimat-kalimat yang membangun wacana itu.

Sampai saat ini kajian wacana masih tergolong jarang dilakukan oleh pemerhati bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai pendorong minat para pemerhati bahasa Jawa untuk mengadakan penelitian lanjutan. Kohesi dan koherensi sangat berperan dalam pembentukan wacana yang utuh. Oleh sebab itu, para

pemakai bahasa Indonesia perlu memahami kedua hal itu dengan baik. Dengan cara itu, mereka diharapkan dapat menyusun wacana dengan baik. Para penyimak wacana bahasa Indonesia pun menjadi terbantu dalam memahami makna wacana bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. 1976. *Cohesion in English*. London. Longman Limited.
- Baryadi. 1990. *Kohesi dan Koherensi dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Ramlan, M. 1993. *Paragraf, Alur Pikiran dan Kepaduannya dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : Andi Affset.
- Ramlan, M. 1996. *Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis*. Cetakan ketujuh. Yogyakarta: C.V. Karyono.
- Sudaryanto. 1986. *Ke Arah memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik : Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.